

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 FASILITAS SOSIAL

Fasilitas sosial merupakan seperangkat sarana atau fasilitas yang meliputi; sarana kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemerintah dan pelayanan umum, parkir, pertamanan dan ruang terbuka hijau serta pemakaman umum[9][10]. Fasilitas sosial juga dapat diartikan sebagai fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, dimana pengertian ini bersanding pula dengan kawasan fasilitas umum[11].

Fasilitas sendiri dapat diartikan berupa segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan[12]. Sementara fasilitas sosial merupakan fasilitas yang digunakan orang banyak yang diadakan oleh pemerintah atau swasta yang diperuntukkan bersama oleh masyarakat umum[13], adapun pada penelitian ini fasilitas sosial yang akan diteliti terbagi menjadi 5 (lima) fasilitas sosial, yaitu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perbelanjaan dan niaga, fasilitas peribadatan dan fasilitas pemerintahan. Penjabaran umum fasilitas sosial tersebut dapat yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat[14].

Secara garis besar, fasilitas kesehatan memiliki peran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001[15] menjelaskan bahwa sarana pelayanan kesehatan dalam standar pelayanannya terbagi menjadi 4 (empat) tingkat pelayanan yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Kesehatan

Bidang Pelayanan	Indikator	Standar Pelayanan		Kualitas
		Kuantitas		
		Cakupan	Tingkat Pelayanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarana Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangka uan pelayanan. Tingkat harapan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan wilayah Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal tersedia: <ul style="list-style-type: none"> 1 unit Balai Pengobatan/ 3.000 jiwa. 1 unit BKIA/RS Bersalin/10.000-30.000 jiwa. 1 unit Puskesmas/ 120.000 jiwa. 1 unit Rumah Sakit/240.000 jiwa. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi di pusat lingkungan/ kecamatan, bersih, mudah dicapai, tenang, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah dan pencemaran lainnya.

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001

Peraturan lainnya yang mengatur kebutuhan fasilitas kesehatan termuat dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan[16] yang membagi perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan, adapun tabel data kebutuhan saran fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyele-saian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500 m	Di tengah kelompok tetangga tidak menyebe-rang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m	Di tengah kelompok tetangga tidak menyebe-rang jalan raya	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyele-saian	
3.	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m	-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor Kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m	-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor Kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m	-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotek
7.	Apotek/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m	-	

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

2. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas publik yang berperan sebagai wadah pembelajaran yang diadakan oleh pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik maupun non akademik masyarakat di suatu wilayah. Dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001[15] menjelaskan bahwa sarana pendidikan dalam standar pelayanannya terbagi menjadi 5 (lima) tingkat pelayanan seperti yang dijelaskan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pendidikan

Bidang Pelayanan	Indikator	Standar Pelayanan		Kualitas
		Kualitas		
		Cakupan	Tingkat Pelayanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anak usia sekolah yang tertampung 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan wilayah Kota Sedang/ Kecil Satuan wilayah Kota Besar/Metro 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal tersedia: 1 unit TK u/ setiap 1.000 penduduk 1 unit SD u/ setiap 6.000 penduduk 1 unit SLTP u/ setiap 25.000 penduduk 1 unit SLTA u/ setiap 30.000 penduduk Minimal sama dengan Kota Sedang/Kecil, juga tersedia 1 unit Perguruan Tinggi untuk setiap 70.000 penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah dan pencemaran lainnya

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001

Peraturan lainnya yang mengatur kebutuhan fasilitas pendidikan termuat dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan[16] yang mengatur pembagian perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyele-saian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	215	500	0,28	500 m	Di tengah kelompok warga. Tidak menye-berang	2 rombongan perbelajar per 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m	jalan raya. Bergabung dengan	Kebutuhan harus

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyele-saian	
3.	SLTP	4.800	2.282		1,88	1.000 m	taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.	berdasarkan perhitungan dengan rumus yang ditetapkan. Dapat bergabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
4.	SMU	4.800	2.282		2,6	3.000 m	Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan	
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan	

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

3. Fasilitas Perbelanjaan dan Niaga

Fasilitas peribadatan dan niaga merupakan fasilitas publik yang bercirikan komersial serta sebagai tempat kegiatan transaksi jual beli dilakukan. Pada Keputusan Meteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001[15], fasilitas perbelanjaan dan niaga memiliki standar dalam pelayanan minimumnya yaitu seperti pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Perbelanjaan dan Niaga

Bidang Pelayanan	Indikator	Standar Pelayanan		Kualitas
		Kualitas		
		Cakupan	Tingkat Pelayanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarana Niaga	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal tersedia 1 (satu) pasar untuk setiap 30.000 penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Mudah diakses

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001

Peraturan lainnya yang mengatur kebutuhan fasilitas perbelanjaan dan niaga termuat dalam SNI No. 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan[16] mengatur pembagian perencanaan kebutuhan fasilitas perbelanjaan dan niaga yang dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6 Kebutuhan Fasilitas Perbelanjaan dan Niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Radius Penca-paian	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)			
1.	Toko/Warung	250	50	100	0,4	300	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m	Di pusat kegiatan sub lingkungan
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

4. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berperan untuk masyarakat dalam melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaannya. Dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001[15] menjelaskan sarana peribadatan dalam standar pelayanannya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Peribadatan

Bidang Pelayanan	Indikator	Standar Pelayanan		Kualitas
		Cakupan	Tingkat Pelayanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarana Peribadatan	• Jangkauan pelayanan	• Satuan wilayah Kabupaten/ Kota	• Minimal tersedia 1 (satu) unit tempat ibadah per 2.500 jiwa	• Bersih, tenang, teduh, mudah dicapai

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001

Peraturan lainnya yang mengatur kebutuhan fasilitas peribadatan termuat dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan[16] mengatur pembagian perencanaan kebutuhan fasilitas peribadatan yang dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 8 Kebutuhan Fasilitas Peribadatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Radius Penca-paian	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)			
1.	Musholla/ Langgar	250	45	100	0,36	100 m	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Masjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyelesaian
3.	Masjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	2.800	3.600	0,12		bergabung dalam lokasi balai warga Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Masjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan/kelurahan.
5.	Sarana Ibadah Agama Lain	Tergantung sistem kekerabatan/hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

5. Fasilitas Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan merupakan fasilitas yang dimiliki pemerintah di suatu wilayah yang berperan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan umum dan administrasi. Dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan[16] termuat kebutuhan standar sarana pemerintahan dan pelayanan umum berupa kantor kelurahan yang dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9 Kebutuhan Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyelesaian
Lanjutan...							
6.	Kantor Kelurahan	30.000	500	1000	0,033		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Beberapa sarana dapat digabung dalam

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Penca-paian	Lokasi dan Penyelesaian
						satu kelompok bangunan pada tapak yang sama.	atau pada tapak yang sama.

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

2.2 TUTUPAN LAHAN

Lahan merupakan suatu permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar dan merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia dan biologi tertentu serta berdimensi tiga seperti ruang yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi[17]. Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang tercantum dalam SNI 7645-1:2014 mengenai Klasifikasi Penutup Lahan menyebutkan bahwa penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut[18]. Tutupan lahan terklasifikasikan menjadi berbagai jenis mengacu pada aturan Badan Standar Nasional yang mengklasifikasikan kelas tutupan lahan berdasarkan skala 1:50.000 atau 1:25.000 diantaranya adalah: (1) Perairan laut, (2) Danau, (3) Rawa, (4) Sungai, (5) Pantai, (6) Waduk, (7) Penambangan/penggalan, (8) Lahan terbuka, (9) Permukiman, (10) Pelabuhan, (11) Hutan lahan tinggi primer, (12) Hutan lahan rendah primer, (13) Hutan lahan tinggi sekunder, (14) Hutan lahan rendah sekunder, (15) Hutan rawa/gambut, (16) Hutan mangrove, (17) Ladang, (18) Padang rumput, (19) Padang alang-alang, (20) Perkebunan, (21) Sawah[18].

Suatu kelas tutupan lahan yang berada di suatu wilayah dapat berubah menjadi kelas tutupan lahan yang lain disebut dengan perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan atau alih fungsi lahan merupakan suatu perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang

disebabkan oleh berbagai faktor, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan diantaranya:

1. Adanya kegiatan konversi kawasan hutan untuk pembangunan sektor lain seperti perkebunan, pertanian dan permukiman.
2. Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta peran kota sebagai orientasi arus urbanisasi dikarenakan jumlah kelompok yang berpendapatan menengah hingga atas semakin meningkat yang mengakibatkan secara tidak langsung peningkatan permintaan terhadap kawasan hunian, permukiman serta aksesibilitas dan fasilitas pendukungnya.
3. Terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian yang dapat menyisihkan lahan hijau perkotaan.
4. Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan lahan suatu wilayah.

2.3 KAWASAN PERI URBAN

Kawasan peri urban atau yang dapat diartikan kawasan pinggiran kota merupakan kawasan yang didalamnya terdapat ciri-ciri peralihan kenampakan betul-betul ke kota ke kenampakan betul-betul ke desa. Kawasan peri urban merupakan kota atau kawasan yang wilayahnya terletak di perbatasan dengan kota lain yang hierarkinya lebih tinggi dan memiliki karakteristik adanya wilayah perdesaan serta intensitas wilayah terbangun lebih rendah dari kota pusatnya[1]. Kawasan peri urban juga merupakan suatu zona transisi dimana kegiatan perkotaan dan pedesaan saling berdampingan[19]. Dari sini dapat diketahui bahwa kawasan peri urban merupakan kawasan yang dimana dominasi transformasi pembangunannya dapat dikatakan “kabur” atau tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan transformasi fisik dan proporsi lahan yang mencirikan kota dan lahan yang mencirikan perdesaan memiliki kadarnya masing-masing[1].

Dalam perkembangannya, kawasan *peri urban* dibagi menjadi dua kenampakan zona, yaitu zona bingkai kota atau *urban fringe* dan zona bingkai desa atau *rural fringe*. Zona bingkai kota merupakan bagian dari wilayah *peri urban* yang berbatasan langsung dengan lahan kota terbangun dan masih menyatu dengan permukiman kota utama, sehingga menunjukkan kepadatan permukiman yang lebih tinggi dari rerata kepadatan yang ditampilkan wilayah *peri urban* sendiri. Sementara zona bingkai desa merupakan wilayah yang berada

didalam *peri urban* dan berbatasan langsung dengan zona bingkai kota yang menunjukkan adanya kepadatan permukiman yang lebih rendah dibandingkan rerata kepadatan permukiman di seluruh wilayah *peri urban*[1].

Disamping itu, terdapat 6 (enam) faktor yang melatarbelakangi perkembangan ruang perkotaan ke kawasan per urban, antara lain faktor aksesibilitas, pelayanan umum, karakteristik lahan, karakteristik pemilik lahan, regulasi terkait tata guna lahan dan kemampuan pengembang melihat nilai ekonomis lahan yang berada di peri urban[20]. Selain faktor yang melatarbelakanginya, berkembangnya kawasan peri urban juga disebabkan oleh dua macam kekuatan, yaitu adanya kekuatan penarik serta adanya kekuatan pendorong [1].

2.4 STUDI TERDAHULU

Studi terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan acuan dan bahan sebagai perbandingan dari penelitian yang sedang diteliti saat ini guna menghindari kesamaan dalam proses dan *output* nya dengan penelitian yang terdahulu, terlepas semuanya dari kesengajaan atau ketidaksengajaan. Selain hal tersebut, guna studi terdahulu juga berperan sebagai tolak ukur dan orientasi bagi penulis untuk mengetahui bagaimana metode penelitian yang digunakan, serta memprediksi hasil yang akan didapatkan. Dalam bagian ini, peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peneliti sekarang ambil sebagai fokus dalam penelitiannya.

Penelitian-penelitian terdahulu berikut ini yang peneliti sekarang jadikan sebagai acuan dirasa memiliki pemikiran yang saling terkait dengan tema penelitian yang saat ini sedang dibahas meliputi fasilitas sosial, tutupan lahan dan kawasan peri urban serta teknik analisis yang digunakan. Adapun beberapa hasil studi terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel 2.10, sementara untuk perbedaan yang dapat diketahui antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini secara garis besar yaitu meliputi metode analisis dan variabel yang digunakan, ruang lingkup substansi dan lokasi penelitian serta sasaran dan hasil penelitian yang diharapkan. Perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2. 10 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Rio M Fauzi, Joko Nugroho R, Ratna Herawatiningsih. (2016)	Analisa Perubahan Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Naning Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.	Luas tutupan lahan, perubahan luas tutupan lahan.	Kuantitatif	Analisis deskriptif Pengolahan citra Penafsiran citra Verifikasi data hasil penafsiran Pengolahan citra digital Analisis <i>overlay</i>	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berupa kawasan Hutan Lindung Gunung Naning yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau pada tahun 2002 dan tahun 2013 yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelas penutupan lahan yaitu Hutan Lahan Kering Primer mengalami penurunan luas sebesar 1.283 Ha atau sebesar 4,85%, Pertanian Lahan Kering Campur Semak mengalami penambahan luas sebesar 783,02 Ha atau 22,76%, Semak Belukar mengalami penambahan luas sebesar 495, 42 Ha atau sebesar 4,34% dan Permukiman mengalami penambahan luas sebesar 4,64 Ha atau sebesar 16,78% [21].
Rizky Mulya Sampurno, Ahmad Thoriq. (2016)	Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan Citra Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) di Kabupaten Sumedang.	Klasifikasi tutupan lahan.	Kuantitatif	Analisis deskriptif Pra-pengolahan citra Pemilihan kombinasi band	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pengklasifikasian citra Landsat 8 OLI di Kabupaten Sumedang menghasilkan 10 kelas tutupan lahan yang terdiri dari; lahan terbangun, sawah menjelang panen, sawah baru tanam, semak belukar, hutan tutupan

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Interpretasi visual citra Membuat penciri kelas Analisis separabiitas Klasifikasi citra Uji akurasi	padat, hutan tutupan sedang, hutan campuran, kebun campuran, tanah terbuka dan badan air [22].
Lila Juniyanti, Lilik Budi Prasetyo, Dwi Putra Aprianto, Herry Purnomo, Hariadi Kartodihardjo. (2020)	Perubahan Penggunaan dan Tutupan Lahan, Serta Faktor Penyebabnya di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau (Periode 1990-2019).	Perubahan penggunaan dan tutupan lahan, penyebab perubahan penggunaan dan tutupan lahan.	Kuantitatif	Analisis deskriptif Interpretasi citra Uji akurasi	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu telah terjadinya perubahan penggunaan dan tutupan lahan yang periode 1990-2000 terjadi deforestasi yang sangat tinggi diikuti dengan peningkatan luas area kebun campuran. periode 2000-2010 tutupan hutan terus mengalami penurunan yang diikuti dengan peningkatan kebun campuran. Periode 2010-2019 deforestasi mulai melandai karena tutupan hutan kurang dari 10% luas total Pulau Bengkalis [23].
Rakhman Adhiatma, Widiatmaka, Iskandar Lubis. (2020)	Perubahan dan Prediksi Penggunaan/Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan	Perubahan tutupan lahan, prediksi perubahan tutupan lahan	Kuantitatif	Analisis deskriptif Interpretasi citra Verifikasi dan validasi Uji akurasi	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perubahan tutupan lahan di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2007 sampai tahun 2019 bertambah dengan luasan paling tinggi adalah lahan terbangun dan

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				<i>Analisis cellular automata (CA) markov</i>	perkebunan. Tutupan lahan yang mengalami penurunan luasan adalah ladang/tegalan dan sawah. Hal ini diakibatkan adanya perkembangan infrastruktur yang begitu masif di Kabupaten Lampung Selatan [24].
Khinly D. Ngion, Vicky H. Makarau, Steven Lintong. (2021)	Pengaruh Kawasan Wisata Bukit Kasih Kanonang Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Aspek Sosial-Ekonomi Masyarakat	Perubahan penggunaan lahan, pengaruh kawasan wisata terhadap aspek sosial, pengaruh kawasan wisata terhadap aspek ekonomi	Kuantitatif	Analisis deskriptif Analisis spasial Analisis persamaan regresi linear sederhana Uji koefisien determinasi Uji t	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu objek wisata dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan baik pada kawasan objek wisata tersebut maupun kawasan sekitar objek wisata. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan guna lahan pada kawasan sekitar objek wisata tersebut yang semakin berkembang dengan adanya perubahan guna lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Selain perubahan penggunaan lahan telah terjadi pula perubahan fungsi bangunan dari hunian menjadi perdagangan dan jasa [25].
Alfin Murtadho, Siti Wulandari, Muhammad Wahid, Ernan Rustiadi. (2018)	Perkembangan Wilayah dan Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Purwakarta sebagai	Perkembangan wilayah, perubahan tutupan lahan, prediksi	Kuantitatif	Analisis deskriptif Analisis spasial Analisis	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 15 tahun (2000 hingga 2015) mengalami peningkatan luas tutupan lahan terbangun dan kebun

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dampak dari Proses Konurbasi Jakarta-Bandung	penggunaan /penutupan lahan.		skalogram Analisis <i>overlay</i> Metode permodelan <i>CA Markov</i>	campuran, sedangkan lahan terbuka, hutan, sawah dan badan air mengalami penyusutan luas. Sebagian besar peningkatan lahan terbangun cenderung terjadi pada wilayah yang berada dekat atau dilalui dengan jalur aksesibilitas utama, serta pada tahun 2030 diprediksi jenis tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas dari tahun 2015 adalah lahan terbangun dan lahan terbuka [26].
Welky Putra, Afriza Masrizal, Puji Astuti. (2016)	Analisis Pola Pergerakan Penduduk dalam Mengonsumsi Fasilitas Sosial di Kawasan Pingiran Kota (Studi Kasus: Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)	Fasilitas sosial, pola pergerakan.	Kualitatif	Analisis deskriptif Analisis faktor pergerakan penduduk Analisis kecenderungan arah dan besaran pergerakan penduduk	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penduduk kawasan pinggiran kota (peri urban) dalam mengonsumsi fasilitas sosial cenderung mengonsumsi fasilitas sosial diluar wilayahnya sendiri. Penduduk lebih memilih kawasan pusat kota dan kawasan transisi pusat Kota Pekanbaru dalam mengonsumsi fasilitas sosial dikarenakan ketersediaan fasilitas sosial yang memadai (kuantitas), kualitas barang lebih baik, pelayanan yang memadai, kemudahan transportasi dan kepercayaan [27].

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Hukma Zulfinanda. (2020)	Analisis Tipologi Wilayah Peri Urban Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Penggunaan lahan, aksesibilitas, utilitas, kependudukan, indeks ketahanan ekonomi	Kuantitatif	Analisis tipologi wilayah <i>peri urban</i> Analisis skoring Analisis spasial	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu didapatkan tipologi wilayah di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yaitu <i>peri urban</i> yang terdiri dari <i>peri urban</i> primer, <i>peri urban</i> sekunder dan <i>rural peri urban</i> yang dinilai dari aspek fisik, ekonomi dan sosial [28].
Zuhallfi Akbar Rinda. (2021)	Transformasi Spasial Di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah	Tutupan lahan, aksesibilitas, kependudukan, kebijakan, nilai lahan	Kuantitatif	Analisis <i>overlay</i> Analisis skoring	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu transformasi spasial yang terjadi di Kecamatan Siantan berdasarkan lahan terbangunnya yaitu berpola <i>ribbon development</i> di sepanjang jalur arteri dan berpola <i>ribbon development</i> dan <i>leapfrog development</i> di sepanjang jalur lokal-lingkungan, selain itu transformasi spasial yang terjadi di Kecamatan Siantan pada tahun 2010-2015 mengalami perubahan yang bersifat rendah, sedangkan pada periode 2015-2020 mengalami perubahan yang bersifat sangat tinggi [8].

Sumber: Identifikasi Peneliti, 2022

Tabel 2. 11 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Saat Ini

Peneliti (Terdahulu)		Peneliti (Sekarang)	
Rio M. Fauzi, Joko Nugroho R, Ratna Herawatiningsih. (2016) [21]	Menganalisis perubahan tutupan lahan di Kawasan Hutan Lindung pada tahun 2002 dan tahun 2013.	Yudistiro Prayoga. (2022)	Menganalisis perubahan tutupan lahan di pinggiran Kecamatan Pontianak Barat (Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Pal Lima) serta Desa Rengas Kapuas (Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah) sebagai kawasan peri urban pada tahun 2021, tahun 2015, tahun 2010 dan tahun 2005.
Rizky Mulya Sampurno, Ahmad Thoriq. (2016) [22]	Menganalisis klasifikasi tutupan lahan menggunakan citra Landsat 8 <i>Operational Land Imager</i> (OLI).		Menganalisis klasifikasi tutupan lahan menggunakan peta <i>Google Earth</i> .
Lila Juniyanti, Lilik Budi Prasetyo, Dwi Putra Aprianto, Herry Purnomo, Hariadi Kartodihardjo. (2020) [23]	Menganalisis perubahan tutupan lahan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dengan menyinggung pengaruh arah kebijakan dan kelembagaan sebagai penyebab fundamental perubahan tutupan lahan.		Menganalisis perubahan tutupan lahan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir dengan menyinggung pengaruh yang disebabkan oleh adanya ketersediaan fasilitas sosial.
Rakhman Adhiatma, Widiatmaka, Iskandar Lubis. (2020) [24]	Menganalisis perubahan tutupan lahan dan prediksi tutupan lahan yang akan datang/ke depannya.		Menganalisis perubahan tutupan lahan pada tahun 2005, tahun 2010, tahun 2015 dan tahun terakhir 2021.
Khinly D. Ngion, Vicky H, Makarau, Steven Lintong. (2021) [25]	Menganalisis pengaruh adanya kawasan wisata terhadap perubahan penggunaan lahan dan sosial-ekonomi masyarakat.		Menganalisis pengaruh adanya ketersediaan fasilitas sosial terhadap perubahan tutupan lahan.

Peneliti (Terdahulu)		Peneliti (Sekarang)
Alfin Murtadho, Siti Wulandari, Muhammad Wahid, Ernan Rustiadi. (2018) [26]	Menganalisis perkembangan wilayah dan perubahan tutupan lahan sebagai dampak konurbasi Jakarta-Bandung serta prediksi tutupan lahan hingga 2030.	Menganalisis perubahan tutupan lahan sebagai pengaruh oleh adanya fasilitas sosial dalam kurun waktu 2005-2021.
Welky Afriza, Putra Masrizal, Puji Astuti. (2016) [27]	Menganalisis pola pergerakan penduduk di kawasan pinggiran dalam mengkonsumsi fasilitas sosial.	Menganalisis ketersediaan fasilitas sosial dalam mempengaruhi perubahan tutupan lahan di kawasan peri urban.
Hukma Zulfinanda. (2020) [28]	Menganalisis bentuk tipologi wilayah <i>peri urban</i> di seluruh Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan menilai dari aspek fisik, ekonomi dan sosial.	Menganalisis bentuk perubahan tutupan lahan di kawasan pinggiran Kecamatan Pontianak Barat (Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Pal Lima) serta Desa Rengas Kapuas (Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah) dengan menilai pengaruh dari adanya ketersediaan fasilitas sosial.
Zuhallfi Akbar Rinda. [8]	Menganalisis transformasi spasial di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah dalam rentang waktu 2010, 2015 dan 2020 serta mengetahui faktor-faktor potensi dan permasalahan yang terjadi	Menganalisis seberapa besar pengaruh dengan adanya ketersediaan fasilitas sosial terhadap perubahan tutupan lahan di kawasan pinggiran Kecamatan Pontianak Barat dan Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap dalam rentang waktu 2005, 2010, 2015 dan 2021.

Sumber: Identifikasi Peneliti, 2022